

BAB I

TAKTIK PENCEGAHAN

Tidak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ketika organisasi-organisasi HAM ramai memberikan fokus sentral atas pelaporan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu atau yang tengah berjalan. Ketika itu, piranti utama yang dikenal dalam kotak perkakas (*tool box*) hak-hak asasi manusia hanyalah 'palu', dan karena itu sebagian besar pihak yang berkecimpung dalam kerja-kerja HAM hanya bergantung pada satu taktik, yakni: "menyebutkan nama dan memermalukan" ("*naming and shaming*") negara-negara yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan. Walau dalam dirinya sendiri taktik ini merupakan sesuatu yang berharga—namun kini kotak perkakas yang sama telah diisi dan diperluas secara dramatis—oleh begitu banyak aktor baru yang bergelut dalam kerja-kerja HAM.

Kami telah menyaksikan sebuah perubahan yang menonjol dalam lingkungan HAM pada dekade yang baru lalu. Agenda ini bergerak dari penciptaan kerangka kerja legal internasional menuju diskusi-diskusi serius mengenai implementasi kerangka kerja tersebut secara membumi, di lapangan. Pada saat yang sama, telah terjadi pula pergeseran dari upaya-upaya internasional menuju kerja-kerja lokal, dan kelompok-kelompok lokal sering kali mencakup taktik intervensi maupun pencegahan secara sekaligus sebagai tujuan-mereka. Sebuah ornop (organisasi non pemerintah) lokal, sebagai contoh, mungkin saja mendekati pihak kepolisian untuk mempertanyakan sebuah kasus khusus penyiksaan, serta mendiskusikan bagaimana agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Kelompok-kelompok ini menggunakan taktik baru yang belum lazim dipakai oleh organisasi-organisasi HAM tradisional. Mereka tidak hanya mengkritisi; mereka membentuk hubungan kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah untuk membantu mereformasi perundang-undangan; mereka menawarkan pelatihan kepada kesatuan-

kesatuan kepolisian dan menyusun kurikulum bersama; serta membuat kehadiran mereka diakui secara signifikan.

Kerja-kerja perlindungan dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia terus bergerak dan kian meningkat, taktik-taktik yang Anda baca dalam Bab-Bab ini mungkin saja akan menjadi bagian dari sumbangan yang akan membuat dekade mendatang menjadi lebih baik lagi.

Morten Kjaerum

Direktur, *Danish Institute for Human Rights*

Kopenhagen, Denmark

Dalam upaya untuk mencegah pelanggaran HAM kita mesti mengenali kapan orang berada dalam bahaya ancaman fisik; kapan hak kebebasan bergerak atau hak atas pekerjaan, serta hak atas perumahan yang layak akan dibatasi; kapan pula sebuah kelompok berada dalam bahaya kehilangan suaranya dalam masyarakat, atau sebuah komunitas berada dalam bahaya jatuh ke dalam kemiskinan; atau kapan sebuah cara hidup suku-suku adat di pedalaman akan terancam dipunahkan.

Taktik-taktik dalam Bab ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang segera terjadi. Kadang kala cara yang paling efektif untuk melakukan hal itu adalah dengan semata-mata dengan berada di lokasi tempat kejadian. Kehadiran fisik dari orang yang lain—apakah seorang relawan dari sebuah negara dengan pemerintahan yang berpengaruh—atau sekerumunan penonton yang akan berlaku sebagai saksi—kerap kali dapat mencegah pihak-pihak yang potensial menjadi pelanggar.

Kadang pelanggaran HAM terjadi karena orang-orang tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mencegahnya. Memperoleh informasi dari tangan yang tepat—dari mereka yang secara langsung akan dipengaruhi oleh pelanggaran tersebut, atau dari pihak lainnya yang dapat memobilisasi perlawanan terhadapnya—acap kali dapat menghentikan terjadinya pelanggaran.

Kerap kali cara terbaik untuk melindungi hak asasi manusia adalah dengan menyingkirkan potensi bagi pelanggaran. Mengenali pola pelanggaran memungkinkan kita untuk mengubah situasi, sehingga potensi pelanggaran HAM dapat ditekan sampai sekecil mungkin.

Taktik-taktik di dalam Bab ini dibagi ke dalam tiga kelompok:

1. Taktik perlindungan fisik yang mencegah ancaman melalui kehadiran fisik.
2. Taktik memperoleh informasi kritis dari tangan orang-orang yang dapat mencegah pelanggaran.
3. Taktik mengantisipasi pelanggaran dan menciptakan halangan untuk menghentikannya.

Perlindungan Fisik

Kita dapat menunjukkan bahwa tak ada solidaritas yang lebih besar dibandingkan dengan keberanian untuk berdiri tegak membela —atau berada di dekat— sahabat yang tengah berada dalam bahaya.

Taktik dalam kelompok ini melampaui simbolisme, menggunakan kehadiran fisik para relawan untuk melindungi keselamatan yang lainnya.

Ini merupakan ide yang relatif sederhana dan berpengaruh: keselamatan dalam jumlah. Orang atau pihak-pihak yang tengah bermaksud melukai seseorang mungkin tidak ingin melakukan hal itu di hadapan orang banyak, karena mereka takut akan adanya saksi atau tekanan keras atau konsekuensi lainnya karena melukai seseorang yang memiliki pendukung dari kelompok atau pemerintah yang berpengaruh.

Ini mengarahkan kita kepada sebuah ide lain yang penting:

menunjukkan bahwa Anda memiliki teman dari kalangan yang tinggi (berpengaruh)

Para Pengawal Hak Asasi: Melindungi dan menyemangati aktivis HAM yang terancam bahaya melalui kehadiran relawan internasional

Peace Brigades International—PBI (Brigade Perdamaian Internasional) mengirimkan pemantau internasional untuk mendampingi aktivis HAM yang mendapat ancaman dari pemerintah atau organisasi paramiliter. Jika mereka menyaksikan pelanggaran, para pengawas memberi sinyal kepada penguasa di negara itu, atau kepada pemerintah mereka sendiri dan para aktivis di seluruh dunia. Mengetahui bahwa orang-orang itu dapat mengandalkan reaksi dunia internasional, para pelanggar dihalangi dari serangan terencana mereka. Pada saat bersamaan, aktivis yang didampingi dikuatkan untuk terus melanjutkan dan memperluas kerja mereka bagi hak asasi manusia. PBI adalah salah satu organisasi pertama yang ‘menginstitutionalisasikan’ ide pendampingan ini. Dimulai di Guatemala di awal

1980-an, kini PBI mempertahankan lebih dari 80 relawan di berbagai lokasi di Kolombia, Indonesia, Meksiko dan Guatemala.

Walaupun para relawan itu sendiri merupakan aspek yang paling kentara dari taktik ini, keberhasilan taktik ini sendiri bergantung pada tindakan dari berbagai pihak lain di seluruh dunia. Relawan harus dapat menarik perhatian internasional dengan segera atas sebuah peristiwa serangan atau ancaman. Untuk tujuan ini, PBI memiliki jaringan aktivis di negara asal relawan. Di samping itu, relawan-relawan membawa jaringan keluarga dan teman-teman pada kerja mereka, dan seringkali menggunakan pengalaman aktivis yang bersifat ekstensif dan kontak-kontak dari masa lalu sebagai sumber.

Pendampingan internasional dapat menjadi sulit baik bagi aktivis HAM maupun bagi relawan, yang menghadapi bahaya, tekanan dan hambatan terus-menerus dalam kehidupan pribadi mereka. PBI menempatkan nilai yang tertinggi pada penguatan dan dorongan dari aktivis akar rumput lokal, menawarkan pendampingan hanya atas permintaan dan tidak pernah memaksakan dirinya dalam persoalan internal dari pihak yang didampingi.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam Buku Catatan Taktis (*Tactical Notebook*) yang tersedia di situs web <www.newtactics.org> di bagian *Tools for Action*; simak pula *Unarmed Bodyguards: International Accompaniment for the Protection of Human Rights* oleh Liam Mahoney dan Luis Enrique Eguren yang diterbitkan oleh Kumarian Press, 1977.

Taktik ini dibangun dengan berpijak pada realitas universal bahwa kita semua adalah subyek dari tekanan moral dan politis. Para pemimpin nasional tidak menginginkan sorotan pers yang buruk. Bahkan para pembunuh tingkat rendah tidak menginginkan adanya saksi yang melihat kerja-kerja kotor mereka. Setiap orang memilih anonimitas dalam melakukan kejahatan; tak seorang pun menginginkan hadirnya saksi perbuatan jahat. Dengan cara menempatkan saksi internasional tepat di hadapan para pelaku dan secara simultan menempatkan tekanan eksternal atas para otoritas nasional, serangan-serangan tersebut dapat dihalangi. Sementara itu, dengan cara menunjukkan kepada aktivis yang terancam yang bahwa solidaritas internasional sampai ke titik siap untuk 'turut pasang badan' dengan mengambil resiko hadir langsung di tengah-tengah sisi mereka, para aktivis tersebut diberanikan dan diteguhkan dalam kerja-kerja mereka yang memang penuh ancaman.

Semenjak saat itu pendampingan fisik telah digunakan sebagai sebuah taktik dalam situasi lain, ketika para aktivis berada dalam ancaman fisik dan para pelaku

pelanggaran bisa disorot oleh opini internasional. Kelompok-kelompok lain yang menggunakan taktik ini termasuk *Nonviolent Peaceforce* di Sri Lanka, *Christian Peacemaker Teams* di West Bank, Organisasi Solidaritas Nasional untuk Orang-Orang Guatemala, *Ecumenical Accompaniment Program* di Palestina dan Israel, *Fellowship of Reconciliation* di Kolombia, *Centro Fray Bartolome de Las Casas* di Mexico dan lain-lainnya.

Dinamika ini dapat digunakan dalam *setting* lainnya pula. Kekuatan simbolis dari rohaniwan atau jurnalis, misalnya, seringkali memiliki pengaruh protektif atau menenangkan dalam situasi-situasi penuh ketegangan atau kekerasan; karena para pelaku tidak ingin terlihat buruk dalam situasi semacam itu. Di Haiti, *Partners in Health* mempekerjakan pekerja kesehatan komunitas yang disebut *accompagneurs* yang melakukan kunjungan harian kepada para pasien HIV/AIDS dan TBC, yang—di samping menyediakan dukungan medis dan emosional—menunjukkan kepada anggota komunitas bahwa mereka tidak perlu takut dengan kontak fisik/berdekatan dengan para penderita penyakit itu. Di sini lagi-lagi kehadiran simbolis dan fisik pihak ketiga yang berkomitmen, membawa bobot moral dan sosial yang dapat mengubah perilaku.

Bagaimana Anda dapat memfokuskan perhatian internasional ke arah perjuangan Anda?

‘Rencana B’: Melindungi para demonstran yang ditangkap dengan aksi-aksi protes di luar tempat penahanan

Di Serbia, di bawah rezim Milosevic, sekelompok aktivis muda mendasarkan diri pada ide keselamatan dalam mobilisasi massa, menggunakan demonstrasi sekunder untuk melindungi anggota-anggota yang telah ditangkap selama demonstrasi dan membuat ancaman penangkapan tidak efektif. Mereka juga menggunakan humor dan teater untuk mengurangi ketakutan warga terhadap kekuasaan pemerintah.

“*Otpor!*” (“Lawan!” di Serbo-Kroasia) menyiapkan demonstrasi sekunder—“Rencana B” mereka—di luar kantor polisi untuk menanggapi secara cepat penangkapan selama aksi demonstrasi. Polisi tidak begitu berminat melancarkan

pemukulan atau menahan para aktivis, mengetahui bahwa jumlah massanya begitu besar dan sejumlah jurnalis tengah meliput peristiwa ini di luar, sementara para aktivis di dalam tidak sedemikian kuatir, berkat dukungan yang mereka peroleh.

Sekali penangkapan terjadi, "*Otpor!*" Melaksanakan Rencana B dengan cara memobilisasi jaringan kontaknya yang luas:

- Pemantau yang dekat dengan telepon seluler, mencatat proses penangkapan dan mengidentifikasi kantor polisi tertentu yang menerima aktivis yang ditangkap.
- Para pengacara dengan segera berangkat ke kantor polisi untuk menegosiasikan pembebasan aktivis.
- Dalam hitungan kurang dari satu jam, para aktivis "*Otpor!*" lainnya berkumpul, di depan kantor polisi. Mereka menggelar pertunjukan, berbagai permainan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk menjaga dinamika massa agar tetap terkontrol dan tidak brutal. Para aktivis tetap bertahan di luar kantor polisi sampai para tahanan dibebaskan.
- Kontak-kontak media pergi ke kantor polisi untuk melaporkan protes itu dan mengambil pernyataan dari para aktivis setelah mereka dibebaskan.
- Pihak-pihak oposisi mengutuk penangkapan tersebut dan mengirimkan anggota mereka ke kantor polisi.
- Ornop lokal menginformasikan organisasi-organisasi internasional dan memintakan dukungan mereka untuk mengutuk penangkapan tersebut.

"*Otpor!*" menghabiskan cukup banyak waktu dan upaya untuk membangun jaringan yang kuat, ekstensif dan loyal yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Rencana ekstensif menggariskan kawan yang akan mengontak kawan-kawan lainnya, serta rangkaian tindakan lainnya yang harus segera dilaksanakan oleh tiap-tiap kawan setelah peristiwa penangkapan, sehingga demonstrasi susulan dapat mengikuti penangkapan tersebut nyaris dalam sekejap. Kebanyakan informasi kontak bagi jaringan disimpan pada telepon seluler anggota-anggota secara perorangan, sehingga polisi tidak dapat begitu saja menghancurkan jaringan kontak dan informasi ini.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di situs <www.newtactics.org>, di bawah materi *Tools for Action*.

"Rencana B" "*Otpor!*" merupakan contoh menarik perihal tujuan taktik yang dirumuskan dalam bagian-bagian Buku Acuan Kerja ini. Pihak yang menggelar

taktik ini mencegah penyiksaan yang akan segera terjadi terhadap para aktivis di dalam kantor polisi. Mereka mengintervensi untuk menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi dari rezim Milosevic dengan cara melemahkan kekuatan polisi. Mereka membantu menyembuhkan dan mengembalikan kepercayaan diri dari para pemrotes yang telah ditangkap, dan membantu para relawan mengatasi rasa takut untuk ditangkap. Selain itu visibilitas dari demonstrasi tersebut membangun kesadaran akan pelanggaran rezim dan gerakan perlawanan demokratik yang tengah bertumbuh.

Keberhasilan “*Otpor!*” amat bergantung pada sejumlah faktor kritis. Sementara negara tengah menderita di bawah rezim otokratik, para pengacara “*Otpor!*” masih dapat menemui para aktivis dan memiliki sejumlah pengaruh pada pihak kepolisian. Dengan cara yang sama, polisi dan rezim masih menakuti publik luas yang berkumpul bersama dan opini publik internasional. Dalam sebuah masyarakat yang tertutup secara total, tak satupun dari hal ini yang akan terjadi.

Apa rencana B Anda?

*Semua aktivis kami yang ditangkap justru menjadi pahlawan.
Karena mereka memiliki dukungan dari ratusan orang
yang menanti mereka di luar kantor polisi,
mereka tidak lagi merasa takut.
Maka dimulailah sebuah kompetisi
mengenai siapa yang merupakan aktivis yang “paling diinginkan”
dan siapa yang pernah ditahan lebih banyak.
Kami tertawa di hadapan rezim
dan seluruh dunia menyimak
tentang apa yang tengah terjadi atas diri kami*

**Zorana Smiljanic
Otpor!, Serbia**

Kehadiran Protektif: Menjaga keberlangsungan kehadiran fisik di situs pelanggaran potensial untuk memantau dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia

Di seluruh penjuru *West Bank*¹, *Machsom Watch* menggunakan kehadiran perempuan-perempuan Israel untuk melindungi orang-orang Palestina yang bepergian melintasi pos-pos pemeriksaan Israel dan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap dihormati.

Machsom Watch memantau sejumlah pos pemeriksaan Israel setiap pagi dan sore terutama selama periode lalu lintas tertinggi untuk memprotes pos pemeriksaan dan melindungi hak dari individu Palestina yang harus melintasi pos pemeriksaan tersebut. Semua relawan *Machsom Watch*² adalah perempuan Israel. Organisasi ini dibentuk pada bulan Januari 2001, dengan beranggotakan tiga orang relawan perempuan saja dan kini telah berkembang menjadi 300 relawan.

Para pemantau *Machsom* memandang pos pemeriksaan sebagai pelanggaran HAM, karena membatasi hak kebebasan bergerak orang-orang Palestina yang berimbas pada hak atas pendidikan, perawatan medis maupun pekerjaan mereka. Pemantau melaksanakan tiga fungsi utama di pos pemeriksaan: mereka mencegah pelanggaran, mendokumentasikan pelanggaran yang mereka saksikan dan menunjukkan solidaritas bagi orang-orang Palestina.

Kehadiran perempuan-perempuan Israel tersebut mempersulit para tentara Israel untuk melakukan praktik-praktik pelanggaran terhadap orang-orang Palestina yang melintasi pos pemeriksaan. Hal ini dibenarkan oleh tim pemantau *Machsom* maupun orang-orang Palestina sendiri. Ketika para serdadu mencoba menahan orang-orang agar tidak melewati atau hendak menyita kartu tanda pengenal, para pemantau secara diam-diam namun tegas mengintervensi jika mereka pikir hal ini cukup efektif. Ketika mereka menyaksikan pelanggaran serius, pemantau sering mengadakan peristiwa ini kepada jajaran tentara yang berpangkat lebih tinggi dan mendorong orang-orang Palestina untuk melakukan hal serupa.

Pemantau yang menyaksikan pelanggaran membuat laporan terinci dan mempublikasikannya di website mereka. Mereka mengundang jurnalis, politisi dan pihak-pihak lainnya untuk bergabung dengan mereka di pos pemeriksaan. Dan mereka membubuhkan label yang bertuliskan dalam bahasa Arab "Tidak untuk pos

1. Daerah yang diduduki oleh negara Israel (sejak tahun 1967). Dahulu lebih dikenal sebagai Judea-Samaria atau 'perbukitan Judea sebelah barat Sungai Yordan'. Sebutan *West Bank* mengacu pada batasan geografis ini. Diolah dari berbagai sumber (eds.).
2. *Machsom* berarti pos pemeriksaan dalam bahasa Yahudi.

pemeriksaan!” Dengan menunjukkan dukungan ini, aksi-aksi ini telah menyentuh hati banyak orang Palestina, yang secara umum memiliki gambaran tidak positif mengenai semua orang Israel.

Machsom Watch sendiri kerap menemui tantangan dalam kerja-kerjanya. Ada begitu banyak pos pemeriksaan dan tidak ada cukup pemantau untuk mencakup mereka semua. Para relawan mengakui bahwa pihak tentara tidak merasa wajib melaporkan kepada pihak pemantau, atau harus menerima mereka. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa tentara-tentara Israel seringkali dirotasi ke dalam atau keluar dari posisi mereka, sehingga para pemantau tidak dapat membangun hubungan dengan mereka, dan beberapa dari kerja mereka dimulai dari awal lagi dengan setiap rotasi baru dari pihak tentara. Sejauh ini, *Machsom Watch* belum berhasil dalam tujuannya yang lebih luas mengakhiri pendudukan dan menghapuskan pos pemeriksaan. Akan tetapi, ia telah membantu membuat publik Israel dan orang-orang di seluruh dunia lebih sadar mengenai pelanggaran yang terjadi di pos-pos pemeriksaan.

Kehadiran fisik dari seorang individu seringkali lebih efektif manakala didukung oleh sebuah jaringan yang berpengaruh yang dapat menggerakkan informasi secara cepat kepada sejumlah besar orang atau kepada orang-orang yang tepat yang berada dalam posisi kunci yang berpengaruh. *Machsom Watch* menggunakan Internet untuk membagikan pengalaman pemantauannya kepada publik yang lebih luas dan untuk meningkatkan kesadaran di antara orang-orang Israel dan komunitas internasional.

Bagaimana Anda dapat memanfaatkan orang-orang terhormat di komunitas Anda untuk mendampingi sekelompok orang yang berpotensi terkena pelanggaran HAM?

*Ketika kami tiba di pos pemeriksaan (check-point),
ada sejumlah lelaki, perempuan, anak-anak,
deretan taksi, lori penuh hasil-hasil pertanian, sebuah mobil ambulance
dan juga barisan panjang mobil-mobil dari sisi lainnya.
Segera setelah melihat kami, mereka segera datang menghampiri,
seolah-olah kami adalah harapan terakhir mereka.
Mereka lantas menuturkan kisahnya masing-masing...
Kami coba mengontak semua nomor telepon yang ada.*

Akhirnya sebuah "jeep" berisi seorang perwira berpangkat tinggi tiba di lokasi. Pada awalnya ia menolak bicara dengan kami, ia mengecam keberadaan kami di pos pemeriksaan yang hanya menimbulkan masalah saja bagi para tentara Israel... Seorang dokter Palestina dan istrinya baru saja membawa pulang anak perempuan mereka dari Rumah Sakit di Ramallah; walau polisi perbatasan telah mengizinkan sang dokter kembali ke Hebron, namun mereka tak meloloskan istrinya, karena dianggap melewati perbatasan secara ilegal (dokumen bidan miliknya dianggap telah kadaluarsa). Kami tetap bertahan di situ sambil memohonkan ijin bagi orang-orang ini. Kami tidak tahu mengapa atau pada titik apa perwira tersebut justru melembut, tiba-tiba ia memberikan perintah, orang-orang ini diperkenankan melintasi perbatasan. Dalam 15 menit pos pemeriksaan itu sudah kosong dan tak ada pemeriksaan di jalan. Tetapi istri sang dokter tertinggal sendiri dan tersedu-sedu. Rupanya tentara Israel telah mengambil paksa kartu tanda pengenalnya. Tapi tak lama kemudian, ia mendapatkan kartu tanda pengenalnya kembali. Perempuan itu jalan menyusul, bergabung dengan suaminya di seberang. Ketika hendak bergegas pergi, kami mendengar teriakan dari sisi lain pos pemeriksaan, kami lihat dokter itu dan orang-orang lainnya berlompatan turun-naik dan melambai-lambaikan tangan kepada kami, meneriakkan: "Shukran! Shukran!" (Terima kasih! Terima kasih!).

Relawan, Machsom Watch
Pos pemeriksaan Abu-Dis, Israel

Berbagi Informasi Kritis

Informasi yang benar di tangan yang tepat dapat berdampak positif pada pencegahan terjadinya pelanggaran dan membantu penegakan HAM.

Akan tetapi, bahkan dalam masyarakat yang terglobalisasi dan terpenuhi secara teknologi seperti hari ini, hal ini masih merupakan tantangan besar.

Taktik yang dicakup dalam kelompok ini mendemonstrasikan cara inovatif untuk berbagi informasi kritis dengan orang-orang yang dapat membantu mencegah pelanggaran, dengan mereka yang rentan mengalami pelanggaran dan dengan sekelompok besar orang yang dapat berbicara lantang untuk mencegahnya.

Beberapa dari taktik ini memanfaatkan kecanggihan teknologi baru sementara yang lainnya bergantung pada kontak orang per orang.

Semuanya mendemonstrasikan ungkapan lama: pengetahuan adalah kekuasaan

Jaringan Telepon Anti Kekerasan: Menggunakan telepon seluler untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dapat menghentikan kekerasan sebelum meluas

Dalam konflik yang berkepanjangan di Irlandia Utara, kita mendapati bahwa landasan bersama (antara faksi-faksi Katolik dan Protestan yang terpolitisasi) telah menjadi nyaris mustahil. Namun masih ada saja orang-orang di antara kedua kubu ini yang ingin mencegah pecahnya kekerasan. Taktik ini mensyaratkan pengidentifikasian para pimpinan di kedua kubu yang ingin mencegah kekerasan dan membekali mereka dengan informasi yang diperlukan.

Interaction Belfast (sebelumnya dikenal sebagai *Project* Pembangunan Inter-

Komunitas Springfield) menciptakan jaringan telepon seluler anti kekerasan di tengah-tengah lingkungan yang rawan konflik di Belfast. Para relawan baik dari pihak komunitas Katolik maupun Protestan diberikan telepon seluler untuk berkomunikasi dengan rekan mereka yang berada di tempat terpisah, ketika kerumunan massa yang potensial rusuh mulai berkumpul atau ketika desas-desus kekerasan mulai menyebar.

Terdapatlah sebuah “bidang pemisah” di mana lingkungan Katolik (Nasionalis/Republikan) dan Protestan (Unionis/Loyalis) berbatasan satu dengan yang lainnya. Secara fisik dipisahkan oleh tembok besar, lingkungan di sepanjang bidang pemisah cenderung merupakan lingkungan yang paling terbelakang secara ekonomis di Irlandia Utara. Kecurigaan mengenai apa yang tengah terjadi di bagian lain dari dinding pemisah, dapat memicu meluasnya insiden kekerasan.

Relawan dari kedua kubu bertemu setiap minggu dan telepon seluler mereka selalu aktif. Selama peristiwa yang mungkin menyebabkan kekerasan, seperti peristiwa olahraga atau arak-arakan komunitas Protestan yang melintasi lingkungan Katolik, relawan jaringan segera memantau area-area kunci. Para relawan mengakui bahwa mereka dapat mengintervensi secara paling efektif atas kasus-kasus “kekerasan rekreasional” (*“recreational violence”*)—ketika orang-orang muda mencari kegembiraan atau menanggapi kabar angin—tetapi mereka merasa hanya dapat berbuat minim saja dalam kasus-kasus kekerasan terorganisasi atau yang dilancarkan oleh paramiliter.

Ketika relawan melihat atau mendengar orang-orang berkerumun di sepanjang bidang pemisah, atau mendengar desas-desus mengenai akan terjadinya kekerasan pada sisi yang lain, mereka memanggil kawan mereka di seberang bidang pemisah. Relawan menenangkan kerumunan yang berada pada sisi mereka sebelum insiden meletus menjadi aksi kekerasan.

Sejak program dimulai, jaringan telepon telah dengan baik mencegah kekerasan maupun menyediakan informasi yang lebih akurat bagi komunitas di kedua sisi dari bidang pemisah dengan ketika kekerasan itu sungguh terjadi. Pertemuan mingguan dari relawan juga telah menciptakan sebuah kelompok inti dari orang-orang yang terlibat dalam dialog lintas-komunitas yang bersifat reguler. Seiring dengan matangnya hubungan ini, jaringan juga telah mulai mengurus problem umum lainnya yang dihadapi kedua komunitas, termasuk revitalisasi jangka panjang dari area tersebut.

Penggunaan teknologi telepon seluler yang meluas mendatangkan tanggapan

yang lebih cepat terhadap meletusnya pelanggaran yang akan terjadi (atau yang tengah terjadi), dibanding sebelumnya. Di Irlandia Utara telepon telah membuat komunikasi menjadi mungkin—bahkan walaupun kedua kubu pada mulanya tidak memiliki hubungan tertentu yang kuat—tetapi berniat mengakhiri kekerasan.

Kapan saja anak-anak muda di sana dapat berkumpul di dekat bidang pemisah dan mempergunjingkan desas-desus mengenai hal-hal buruk yang terjadi di seberang (yang pada gilirannya potensial memancing reaksi dari seberang); tetapi jika Anda dapat menelepon orang-orang yang ada di sisi seberang dan dapat menyilang-periksa kebenaran mengenai sebuah kabar, ini memungkinkan Anda untuk mendatangi kerumunan tersebut dan mengklarifikasi desas-desus itu.

*Sebelum membangun jaringan,
kami menjumpai anak dari sisi bidang pemisah kami itu datang
dan mengklaim,
"Mereka tengah melakukan ini di sana",
atau,
"Mereka tengah melakukan hal itu",
dan kami tidak mengetahui perbedaannya
Tetapi kini kami memiliki sarana untuk menetralkan semua itu.*

*Anggota
Springfield Inter-Community
Development Project Phone Network
(kini Interaction Belfast), Irlandia Utara*

Telepon Seluler Untuk Mengawal Pemilu Yang Jujur: Menyampaikan perhitungan suara dengan telepon seluler untuk mencegah penyuapan

Jaringan telepon seluler juga dapat berguna dalam situasi lain ketika faktor waktu amat menentukan. Sebagai contoh, selama dan segera setelah Pemilu, kontrol atas kotak suara dan perhitungan suara adalah penting. Di Kenya, jaringan telepon seluler telah digunakan untuk menjaga Pemilu agar tetap adil dan jujur—dengan demikian melindungi hak orang untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di negara mereka—dengan cara melaporkan perhitungan suara sebelum dinodai oleh praktik penyuapan.

Selama pemilihan presiden Kenya tahun 2000, kelompok pemantau independen menggunakan telepon seluler untuk menjaga agar proses pemilihan tetap jujur dengan cara segera melaporkan perhitungan suara dari tiap-tiap TPS (tempat pemungutan suara).

Dalam Pemilu terdahulu, hasil perhitungan suara harus secara fisik dipindahkan ke titik-titik perhitungan kunci sebelum hasilnya dapat disiarkan. Walaupun pemantau memonitor proses ini, penundaan waktu tetap menyisakan kemungkinan terbuka bagi kecurangan, atau sedikitnya kecurigaan akan adanya kecurangan. Komunikasi langsung yang dimungkinkan oleh telepon seluler (di banyak tempat perhitungan suara di Kenya tidak ada jaringan telepon terpasang) membuat pihak-pihak yang berkepentingan semakin sulit untuk mengubah hasilnya.

Dua kelompok diberi kepercayaan oleh komisi pemilihan untuk mengawasi perhitungan suara dan dengan cara itu memantau pemilihan: *Institute for Education in Democracy* (IED) dan *Kenya Domestic Observer Programme* (K-DOP). Relawan IED ditempatkan di 178 dari 210 TPS Kenya. Relawan-relawan tersebut menggunakan telepon seluler mereka sendiri dan diberikan tunjangan sebesar 2000 *Shilling* Kenya (sekitar 26 dolar AS). Mereka menelpon kantor IED pusat untuk melaporkan segera setelah diselenggarakan penghitungan suara; angkanya segera disiarkan melalui internet. Relawan juga menelepon untuk melaporkan pelanggaran dan kecurangan. Hasil IED tersedia bahkan sebelum hasil resmi Komisi Pemilu Kenya, sebagian besar karena Komisi tersebut memiliki protokol yang lebih berbelit-belit untuk menyiarkan hasilnya.

K-DOP juga menggunakan jaringan relawan, tetapi tidak memiliki ketentuan standar untuk penggantian kerugian. Pejabat Komisi Pemilu Kenya juga melaporkan hasilnya dengan telepon, menggunakan telepon satelit milik pemerintah atau telepon seluler mereka sendiri, karena tidak terdapat jaringan telepon terpasang.

Transparansi yang diciptakan oleh pelaporan cepat dan independen dari beberapa jaringan, membantu mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi, karena orang-orang yang berada pada pihak yang kalah dalam Pemilu tersebut bisa saja mencurigai adanya kecurangan. Pelaporan yang cepat memaksa para kandidat yang utama maupun para pendukungnya untuk menerima keabsahan hasil perhitungan suara.

Telepon seluler secara pesat digunakan untuk memastikan bahwa Pemilu itu berlangsung adil dan mengukuhkan hak asasi yang mendasar dalam mengekspresikan kebebasan bersuara dalam Pemilu yang jujur dan adil. Bahkan komunikasi yang cepat, terkadang tidak selalu dapat mempercepat birokrasi. Seorang pemantau di Kenya mencatat bahwa—sementara para pejabat menggunakan telepon seluler untuk melaporkan masalah semacam pemilik hak suara (*voters*) tidak termasuk dalam daftar—beberapa pemegang hak suara (*voters*) masih ditolak untuk diperhitungkan, karena prosedur rumit dalam penyelesaian masalah yang bersangkutan.

Telepon seluler telah digunakan dalam Pemilu lainnya baru-baru ini di seluruh dunia. Selama Pemilu di Peru tahun 2000, pemantau non-partisan dari organisasi *Peru Transparencia* menelepon banyak hasil penghitungan suara (evaluasi dari kualitas pemungutan suara dan proses perhitungan, dari daerah perbatasan hasil pemilihan ke sebuah pusat analisis data sentral) berdasarkan sampel dari tempat-tempat pemungutan suara yang dipilih secara acak dari seluruh penjuru negeri. Beberapa laporan datang dari daerah yang begitu terpencil seperti Andes dan Amazon. Analisis data *Transparencia* [mengenai banyaknya bukti-bukti kecurangan dan pelanggaran] mendorong tekanan nasional dan internasional terhadap Alberto Fujimori untuk menerima keputusan Pemilu ulang.

*Bagaimana Anda bisa menggunakan telepon seluler
atau bentuk lain dari kemajuan teknologi
untuk memperbaiki kerja Anda dan membantu
mengukuhkan hak asasi manusia?*

Penyintas Tahu Pertanyaan yang Patut Diajukan: Melibatkan penyintas pelanggaran HAM dalam mengidentifikasi dan menyelamatkan pihak yang potensial menjadi korban

Para penyintas (*survivor*) pelanggaran HAM memiliki pengetahuan unik mengenai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dan kemampuan khas untuk mengenalinya. Informasi semacam itu dapat digunakan untuk mencegah orang-orang lainnya menderita nasib yang serupa. Organisasi *Maiti Nepal* mendaftarkan relawan perempuan yang pernah jadi korban (perdagangan manusia) untuk membantu menyelamatkan anak-anak dan perempuan lainnya.

Maiti Nepal bekerja untuk menghentikan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan di sepanjang perbatasan Nepal-India dengan cara mewawancarai mereka yang terlihat rentan. Pewawancara *Maiti* lebih mungkin untuk mengenali orang-orang yang korban perdagangan manusia, karena banyak dari mereka juga adalah penyintas praktik perdagangan biadab ini.

Meningkatnya tuntutan akan pekerja seks di rumah-rumah bordil India dan pasar-pasar gelap lainnya berarti pula meningkatnya perdagangan tersebut di sekitar Nepal. Salah satu cara untuk memerangi problem ini adalah dengan mencegah para pedagang melintasi perbatasan, tetapi polisi perbatasan kerap kali gagal dalam mengenali korban potensial atau justru pura-pura tidak mengenalinya.

Maiti Nepal bekerja secara seksama dengan memantau 11 titik transit di sepanjang perbatasan Nepal guna melacak pelancong yang mencurigakan. Mereka menghentikan setiap mobil dan *rickshaw*. Jika ada perempuan atau anak perempuan bepergian dengan pria tak dikenal, penjaga perbatasan menanyai pihak lelaki sementara staf *Maiti Nepal* menanyai sang perempuan. Mereka mengajukan pertanyaan seperti “Mengapa Anda bepergian ke India?” dan “Berapa lama Anda telah mengenali lelaki ini?”; sambil mengamati bahasa tubuh, pakaian dan riasan wajah pihak perempuan. Selama wawancara, mereka juga menginformasikan mengenai bahaya perdagangan seks di India kepada sang perempuan.

Jika penuturan sang pelancong inkonsisten, tersangka pedagang itu akan ditangkap oleh polisi sementara pihak perempuan dan anak perempuan dibawa ke rumah transit aman yang telah dibangun oleh *Maiti Nepal* di dekat perbatasan. Di sini mereka menerima makanan, konseling dan—jika bersedia— pemeriksaan medis dan transportasi kembali ke desa asal mereka. Dalam hal pihak kerabat mereka tidak bersedia menerima seseorang kembali, atau justru diketahui bahwa pihak keluarga juga telah terlibat dalam perdagangan tersebut, maka *Maiti Nepal*

menyediakan penyuluhan dan latihan kerja.

Ratusan korban potensial telah diselamatkan sebagai buah taktik ini dan sejumlah kasus telah diajukan untuk melawan tersangka pedagang, memberikan tekanan pada pemerintahan lokal untuk mengambil tindakan terhadap para pelaku kriminal.

Dalam situasi yang melibatkan perdagangan, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan anak atau prostitusi yang dipaksakan, orang luar mungkin tidak selalu dapat mengenali pelanggaran semudah para pihak penyintas. Korban potensial mungkin juga akan lebih mudah menanggapi seseorang dengan pengetahuan personal mengenai apa yang tengah mereka derita. Partisipasi dari penyintas pelanggaran HAM dengan demikian adalah amat penting bagi implementasi taktik ini. Ketika mantan korban bersedia menyumbangkan dirinya untuk mencegah pelanggaran yang akan datang, maka pengetahuan unik mereka mengenai cara menghadapi praktik-praktik pelanggaran HAM menjadi sedemikian tak ternilai untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Juga yang tidak kalah penting dalam taktik ini adalah kolaborasi yang berhasil antara *Maiti Nepal* dengan pihak penjaga perbatasan, serta kepedulian *Maiti Nepal* untuk tidak serta-merta mengembalikan anak-anak perempuan kepada pihak keluarga yang justru terlibat dalam perdagangan atas diri mereka.

Melindungi Hak dalam Tenggat Waktu Terbatas: Menginformasikan kepada korban potensial mengenai hak mereka ketika terdapat batasan waktu untuk mempertahankan hak tersebut

Kadang kala hukum itu sendiri hanya memberikan jendela kesempatan yang begitu sempit dan terbatas bagi individu untuk melindungi hak-hak mereka. *Centre for Equality Rights in Accommodation* —CERA (Pusat untuk Kesetaraan Hak dalam Akomodasi)— di Ontario, Kanada, menggunakan taktik tanggapan cepat untuk menginformasikan masyarakat mengenai hak mereka dan tenggat waktu (*deadline*) untuk tindakan mereka.

CERA di Ontario, Kanada, menghubungi para penyewa rumah yang beresiko terusir dan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk menghindari pengusiran. Hukum Kanada membatasi hingga lima hari waktu yang dimiliki oleh

penghuni untuk memperkarakan pengusiran, dan banyak orang tidak memiliki informasi atau sumber daya untuk bereaksi cukup cepat dalam mencegah pengusiran tersebut.

Pada tahun 1998, sebuah hukum baru dikeluarkan di Ontario yang memungkinkan tuan tanah untuk meningkatkan sewa unit rumah sesuai dengan harga pasar (hanya) bagi unit rumah yang kosong (sedang tidak dihuni). Tapi ruang kesempatan ini memberikan kesempatan bagi para tuan tanah/induk semang sebuah insentif untuk mengusir penghuni yang lalai, khususnya atas unit-unit dengan harga yang rendah. Setiap tahun sekitar 60.000 orang di Ontario menghadapi praktik pengusiran.

CERA mengajukan petisi kepada *Ontario Rental Housing Tribunal* (Tribunal Penyewaan Rumah Ontario) atas sejumlah daftar penghuni yang menghadapi pengusiran. Pihak tribunal menerima daftar itu dengan syarat bahwa CERA menjamin kerahasiaan individual para penghuni. CERA mengirim surat berisi paket informasi kepada tiap penghuni telah menerima perintah pengusiran dari tuan tanahnya. Relawan CERA kemudian menindaklanjuti dengan telepon untuk menginformasikan kepada para penghuni mengenai hak-hak mereka sebelum periode lima hari berlalu. Selama percakapan ini, relawan menginformasikan kepada penghuni bahwa tuan tanah mereka telah mengajukan permohonan untuk mengusir mereka. CERA mendiskusikan pilihan-pilihan yang mungkin dan menawarkan mereka perantaraan yang relevan. Mereka juga menanyai penghuni mengenai situasi yang mengarah kepada pengusiran, menyediakan informasi penting mengenai penyebab ketidakamanan perumahan. Bagi CERA dan organisasi-organisasi lainnya sejenis informasi ini dapat digunakan untuk mengantisipasi problem sedini mungkin.

CERA menjangkau sekitar 25.000 orang setaip tahunnya. Setelah program itu dimulai, tingkat pengusiran atas mereka yang berhasil dijangkau dengan telepon telah menurun lebih dari 20 %. akan tetapi semenjak bulan Maret 2003, CERA tidak lagi dapat melanjutkan *project* Pencegahan Pengusiran, disebabkan karena *Privacy Commission* (Komisi Privasi) mengeluarkan peraturan yang melarang dikeluarkannya data pengusiran. Saat ini CERA tengah memproses mengajukan naik banding atas keputusan tersebut.

Sementara hukum perumahan Ontario sungguh memberikan individu hak untuk memperkarakan pengusiran mereka, tidak semua penghuni memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk melindungi hak mereka dalam batas waktu yang pendek. Taktik CERA membantu warga masyarakat dalam memperoleh informasi dan menggunakannya dalam tenggat waktu yang tersedia. CERA sungguh membutuhkan

akses atas daftar orang-orang yang terancam menghadapi pengusiran, dan tantangan dalam kasus lain mungkin adalah kekurangan informasi semacam itu. Di samping itu, tidak semua penghuni dapat dijangkau dengan telepon, dan tidak setiap orang berminat atau dapat melakukan upaya cukup untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Apakah jaring tanggapan-cepat
dibutuhkan dalam perjuangan Anda?

Jika demikian,
tipe jaringan seperti apakah yang akan berguna?

Ketrampilan untuk Penduduk Beresiko: Menggunakan teknik pendidikan non-formal untuk memberikan ketrampilan yang dibutuhkan penduduk beresiko agar bertahan dalam perekonomian yang berubah

Di Mongolia pada tahun 1990-an, sebagaimana dalam banyak masyarakat lainnya yang mengalami transisi, pergeseran dari perekonomian yang berorientasi pada negara menuju ke perekonomian pasar, mengancam kaum perempuan (dan imbasnya terhadap anak-anak) terpuruk dalam ancaman kemiskinan, kelaparan dan pelanggaran HAM. *Gobi Women's Project (Project Kaum Perempuan Gobi)* berusaha membawakan informasi yang dibutuhkan oleh kaum perempuan dari area-area pedesaan yang terisolasi di Mongolia untuk bisa berhasil dalam sistem ekonomi yang tengah tumbuh.

Pemerintah Mongolia menggunakan peralatan pendidikan non-formal seperti radio, bahan-bahan cetakan dan guru-guru yang datang berkunjung untuk menjangkau kaum perempuan Gobi yang termarginalisasi dan rentan dan mengajarkan mereka ketrampilan baru yang mereka butuhkan untuk bisa bertahan hidup dalam sebuah ekonomi pasar.

Sesudah ambruknya Uni Soviet pada 1991, perekonomian Mongolia yang tersentralisasi dan dikelola oleh negara juga berakhir. Orang-orang yang seumur hidupnya telah menjalani pertanian kolektif kini diharuskan bertanggungjawab untuk mengadakan kawanan ternak mereka sendiri dan memproduksi serta memasarkan barang dan jasa mereka sendiri. Banyak yang tidak memiliki ketrampilan atau sumber daya untuk melakukan hal ini. Kaum perempuan nomadik di gurun pasir Gobi—sebuah area dengan iklim yang sangat keras dan miskin sistem komunikasi dan transportasi—adalah yang paling rentan secara khusus. Tanpa ketrampilan dagang dan bisnis kaum perempuan dan anak-anak mereka berada pada ambang resiko kemiskinan, kekurangan gizi dan secara potensial, kekerasan dan pelanggaran HAM.

Pemerintah membentuk *Project* Kaum perempuan Gobi dan mengundang semua perempuan di gurun pasir Gobi ke sebuah forum perencanaan komunitas untuk mencari jalan mengatasi berbagai problem mereka. Kelompok itu memutuskan bahwa kaum Ibu yang berfungsi sebagai orangtua tunggal (*single mothers*) dengan sedikitnya tiga orang anak adalah prioritas tertinggi dari kelompok tersebut, juga bahwa program radio—dikombinasikan dengan teknik pendidikan non-formal lainnya—merupakan cara terbaik untuk menjangkau mereka (pendidikan non-formal merujuk pada program pembelajaran yang tidak bersifat wajib juga diadakan di luar sekolah).

Program radio menyediakan informasi mengenai ketrampilan dagang (seperti memproduksi wol, mencukur bulu unta dan membuat kain tebal dari wol atau membuat topi dari kulit binatang, sadel kuda dan pakaian tradisional lainnya), ketrampilan bisnis (seperti negosiasi harga dan perencanaan), serta masalah-masalah kesehatan (seperti keluarga berencana, masalah kebersihan, nutrisi dan pertolongan pertama pada kecelakaan). Program ini disiarkan dua kali seminggu pada waktu-waktu di mana kebanyakan perempuan dirasa mungkin untuk mendengarkan, khususnya pada sore hari. Paket kaset juga tersedia di pusat-pusat pembelajaran lokal untuk siapa saja yang tidak dapat mengikuti program radio. Bahan-bahan penuntun diproduksi untuk digunakan bersama dengan program radio, para guru yang datang berkunjung memeriksa kemajuan kaum perempuan tersebut dan menawarkan bahan-bahan pelengkap.

Pendekatan pendidikan non-formal cukup berhasil dalam memobilisasi kaum perempuan untuk mengambil kendali atas masa depan ekonomi mereka. Mereka mengorganisir pasar-pasar lokal, memulai berbagai *project* kolaboratif lintas komunitas, serta mendorong perluasan *project* hingga melibatkan suami dan anak-anak mereka.

Dalam kasus ini, taktik pembentukan ketrampilan digunakan untuk memastikan hak ekonomi, tetapi program pendidikan non-formal yang mirip dengannya digunakan untuk menjangkau penduduk yang jauh, serta untuk isu-isu yang lain juga. Adalah vital untuk mencatat bahwa para staf *project* kaum perempuan Gobi memperhitungkan gaya hidup dan budaya kaum perempuan yang tengah mereka coba dekati, saat merancang program dan memilih media mereka.

Bagaimana program pendidikan non-formal dapat digunakan untuk memperkuat hak asasi manusia di komunitas Anda?

Menyediakan Informasi dan Ketrampilan yang Dibutuhkan untuk Mengklaim Hak: Memperkuat masyarakat dalam menggunakan sistem hukum untuk menegakkan hak mereka

Jaminan konstitusional atas hak-hak tertentu kerap tidak dilindungi dengan Undang-Undang atau diimplementasikan dalam kenyataan. Ibu-ibu para wajib militer di St.Petersburg menyediakan informasi dan ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengklaim hak konstitusional mereka untuk tidak menjalani dinas militer atau kembali ke unit-unit tempat mereka telah mengalami perlakuan buruk.

Ibu-ibu para wajib militer St.Petersburg mendidik para wajib militer (*wamil*), prajurit baru dan anggota keluarga tentara Rusia mengenai hak mereka di hadapan hukum, sehingga dapat melaksanakan hak-hak tersebut secara efektif .

Di Rusia semua pria muda dituntut untuk menjalani dinas militer. Sementara Undang-Undang tahun 1933 membebaskan para pria dengan alasan kesehatan

buruk atau penderitaan (misalnya orangtua mereka sudah pensiun atau sakit, atau mereka masih bersekolah), Komisi Wamil terus-menerus melanggar Undang-Undang ini. Ibu-ibu para wajib militer ini telah mendokumentasikan berbagai kasus mengenai pria muda dengan problem fisik atau psikologis (yang seharusnya dibebaskan dari dinas militer) namun terus dipaksa untuk bertugas. Komisi Wamil bahkan diketahui telah melaksanakan praktik-praktik pemaksaannya (dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian), di jalan-jalan, di sekolah-sekolah dan di asrama-asrama, bahkan dengan pergi dari rumah ke rumah. Sekali berada di lingkungan militer, anak-anak muda itu menjadi sasaran perlakuan kondisi-kondisi yang amat buruk, termasuk kondisi hidup yang merendahkan martabat manusia, diikuti dengan pemukulan dan penyiksaan setiap malamnya.

Di bangku sekolah HAM yang dikelola ibu-ibu para wajib militer ini, dikenal motto: “Mari Kita Lindungi Anak-anak Kita” (*“Let Us Protect Our Sons”*), para peserta diajari untuk menggunakan Undang-Undang yang ada untuk melindungi hak-hak mereka. Mereka juga didorong untuk percaya bahwa Undang-Undang dapat melindungi mereka dan membuat mereka saling mendukung, serta saling menolong satu sama lainnya untuk melawan rasa takut mereka.

Sesi-sesi pelatihan diadakan sekali seminggu dan berlangsung selama tiga jam. Menunya mencakup instruksi khusus mengenai cara menulis pernyataan kepada pihak penguasa, juga ada sesi simulasi (permainan peran) dan diskusi mengenai Undang-Undang dan HAM. Buku pedoman juga diterbitkan setiap tahunnya.

Kebanyakan orang dapat memperoleh berkas-berkas kesehatan pribadinya dari dokter sipil untuk diserahkan kepada dokter militer. Ibu-ibu para wajib militer ini—dengan staf sepuluh orang—sebagaimana layaknya banyak orang Rusia lainnya, menindaklanjuti pendokumentasian kasus para partisipan melalui kuesioner dan memegang berkas tiap orang dan distrik. Partisipan yang berhasil memproses petisi untuk pembebasan diri mereka, diminta untuk bicara pada sesi kelompok berikutnya. Sekitar 120.000 orang telah berpartisipasi dalam sesi-sesi pelatihan selama lebih dari 12 tahun ini dan tidak kurang dari 90.000 orang berhasil dilindungi hak hukumnya untuk tidak perlu menjalani dinas militer. Sekitar 5.000 orang yang pernah disiksa di dinas kemiliteran telah berhasil mengajukan petisi untuk tidak kembali ke unit-unit mereka.

Sementara di atas kertas, perlindungan konstitusional sesungguhnya diakui di Rusia. Tapi bagi orang-orang muda yang menguatirkan pelanggaran dirinya atau justru telah mengalami pelanggaran selama dinas kemiliteran, minimnya informasi dan kekuatan dalam menggunakan sistem hukum yang ada (sebuah sistem yang

tidak begitu lazim digunakan oleh perorangan di sana), menjauhkan mereka dari pembelaan atas hak-hak mereka. Kekurangan ini bisa diatasi berkat jasa ibu-ibu para wajib militer yang menyediakan informasi mengenai hak-hak mereka dan memperkenalkan berbagai ketrampilan seperti menulis surat dan pedoman melalui sistem hukum yang ada.

Memerangi Korupsi melalui Transparansi: Melacak kinerja pejabat pemerintah secara *online* untuk memerangi korupsi

Di Korea Selatan pemerintah Seoul mendorong pejabatnya untuk bertindak lebih jujur dengan cara berbagi informasi kritis dengan siapa pun yang memiliki koneksi internet.

Pemerintah kota di Seoul, Korea Selatan, telah menciptakan *database online* untuk meningkatkan transparansi pemerintah. Penambahan *Online Procedures Enhancement for Civil Application—OPEN* (Prosedur Online untuk Aplikasi Sipil) memungkinkan warga kota untuk memantau rincian mengenai proposal/aplikasi proyek-proyek pembangunan—yang berkaitan dengan 70 kewajiban pemerintah kotamadya—yang diidentifikasi memiliki kecenderungan paling rentan bagi praktik-praktik korupsi, termasuk proyek pengadaan perumahan dan konstruksi, regulasi lingkungan dan perencanaan tata kota.

Sebelum pengembangan OPEN, para pengaju proposal untuk ijin kerja sama dengan pemerintah tidak mungkin dapat melihat bagaimana sesungguhnya aplikasi mereka diproses. Prosesnya buram, jauh dari transparan, inilah yang memungkinkan pejabat pemerintah korup untuk menuntut sogokan dalam pengajuan aplikasi.

Sekarang, setelah pejabat menerima aplikasi terkini, mereka mengisi formulir *entry* data yang terstandarisasi. Formulir itu digunakan oleh setiap departemen untuk meng-*update database online*. Melalui *database*, pihak pengaju dapat mengetahui siapa saja yang memiliki aplikasi mereka. Dengan demikian mereka dimungkinkan untuk mengikuti terus prosesnya termasuk menyusulkan kelengkapan-kelengkapan aplikasi yang masih kurang, juga bisa mengikuti alasan penundaan atau alasan untuk penolakannya (untuk sebuah aplikasi yang telah ditolak).

OPEN didirikan bersama-sama dengan inisiatif lain untuk memerangi korupsi. Ini mencakup pengenaan sanksi yang lebih keras bagi pejabat yang meminta atau menerima suap. Adanya Kartu Laporan Korupsi (*Corruption Report Card*)

kepada walikota, jalur telepon yang dapat digunakan warga untuk memberi sinyal kepada kantor walikota mengenai kasus-kasus korupsi dan mekanisme rotasi antar departemen bagi para pejabat, untuk mencegah kroniisme.

Website OPEN menerima sekitar 2.500 hits per hari. Survei internet oleh Pemerintah Kota Seoul melaporkan bahwa 78,7% dari penduduk yang disurvei percaya bahwa OPEN secara efektif menurunkan korupsi pemerintah. Baru-baru ini, pemerintah juga mulai menyingkapkan informasi mengenai 35 komite pemerintah kota. Ini berarti bahwa para penduduk dapat juga memantau manajemen dari komite melalui Sistem OPEN.

Sementara OPEN berperan mencegah korupsi dalam aplikasi individual untuk jasa pemerintah, ia juga merupakan sebuah intervensi pada level yang lebih luas, berupaya untuk mengakhiri pelanggaran yang sedang terjadi. Satu faktor dalam keberhasilan sistem ini adalah keterlibatan aktif dari kantor walikota. Tanpa dukungan dari orang-orang berkedudukan tinggi dengan legitimasi publik semacam itu, sebuah sistem seperti OPEN akan sulit diimplementasikan. Keberhasilan dari taktik anti-korupsi ini juga diperkuat oleh meluasnya penggunaan internet di negara itu.

Menyingkirkan Kesempatan bagi Pelanggaran

Kerap terjadi bahwa pola pelanggaran hak asasi manusia berlangsung di tempat-tempat yang dapat diprediksi, serta terjadi di bawah keadaan yang sebenarnya dapat diprediksi juga. Jika kita bisa mengenali pola-pola ini dan mengacaukannya, maka hal ini bisa menjadi taktik jitu untuk melindungi hak asasi manusia. Jika penyiksaan dikenal sebagai problem akut di dalam penjara, maka kemudian menjaga agar orang-orang tetap berada di luar penjara, dapat mencegah maraknya praktik-praktik penyiksaan. Jika sebuah pemerintahan mengikis kebebasan intelektual dengan cara merampas informasi personal, maka memastikan agar sejumlah catatan tetap eksis akan dapat mencegah hilangnya kebebasan ini sama sekali. Taktik dalam kelompok ini semuanya telah digunakan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai problem lainnya, dengan cara mempersulit potensi pelanggaran tersebut, atau bahkan mengondisikannya agar menjadi tidak mungkin—semata-mata dengan cara—menyingkirkan kesempatan bagi (terjadinya) pelanggaran tersebut.

Pekerja Menyelamatkan Pabrik dan Pekerjaan Mereka: Menggunakan Undang-Undang tentang penyitaan (ekspropriasi) untuk memastikan agar hak-hak ekonomi dilindungi

Ketika bisnis gulung-tikar dan pekerjaan menghilang, individu, keluarga dan komunitas ada dalam resiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Dalam kondisi ekonomi yang cenderung menurun di Argentina beberapa waktu yang lalu, banyak bisnis tutup atau bangkrut.

Para pekerja di Argentina telah mencoba mencegah hilangnya pekerjaan dengan cara menolak berhenti bekerja ketika bisnis para majikan mereka dinyatakan bangkrut. Pekerja di hampir 200 *fabricas recuperadas* (pabrik rekuperatif), diselamatkan oleh para pekerja yang menggunakan Undang-Undang ekspropriasi yang tidak begitu dikenal umum, guna mencegah pemindahan peralatan oleh kreditur dan mencoba menjadi penyelenggara kepailitan (*receivership*) atas pabrik-pabrik tersebut. Bisnis itu merentang dari pabrik es krim dan kerja metal hingga hotel-hotel berbintang empat dan perusahaan-perusahaan galangan kapal.

Pada suatu waktu Argentina pernah disebut sebagai “keajaiban ekonomi”, namun kemudian di akhir 1990-an tergelincir ke dalam resesi; kenyataan ini mempurukan banyak orang Argentina ke liang kemiskinan. Gerakan pendudukan pabrik-pabrik muncul di Argentina secara spontan untuk menanggapi kemerosotan ekonomi. Pendekatannya mengikuti sebuah pola umum.

Pertama, bisnis jatuh ke dalam kebangkrutan atau ditelantarkan oleh para pemiliknya. Di titik ini para pekerja kemudian mengambil-alih operasional bisnis tersebut dan menjalankannya secara kooperatif. Mereka mencegah kreditur memindahkan mesin-mesin, sambil mengupayakan keluarnya perintah pengadilan yang memberikan mereka hak untuk melanjutkan bisnis sebagai kompensasi untuk upah yang tidak dibayarkan. Perintah ini diberikan di bawah Undang-Undang yang ada (yang semula dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah lokal mengambilalih properti bagi proyek-proyek kerja publik). Para pekerja harus setuju untuk membayarkan kepada pemilik nilai yang adil dari aset selama periode waktu yang telah ditetapkan dan dapat membayarkan diri mereka sendiri hanya jika mereka menghasilkan keuntungan.

Lebih dari 10.000 pekerjaan telah diselamatkan sebagai hasil dari taktik ini dan para pekerja di sejumlah pabrik rekuperatif, banyak yang tengah dalam proses memiliki aset dari bisnis yang mereka duduki.

Penggunaan Undang-Undang ekspropriasi untuk menjustifikasi pendudukan ini muncul dalam keputusan dan masih memiliki potensi untuk melakukan lebih dibanding semata-mata hanya menjaga agar bisnis tetap berjalan. Ini adalah sebuah langkah menuju pencegahan kemiskinan yang dapat menyebar melalui komunitas-komunitas yang rentan dan menuju peningkatan standar hidup. Ini adalah bentuk ungkapan sangat konkret dari hak manusia atas pekerjaan dan melindungi mata sumber pencahariannya, sebagaimana dicetuskan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Mediasi Komunitas: Menciptakan mekanisme penyelesaian pertikaian alternatif untuk mencegah keterlibatan polisi yang merupakan pelanggaran potensial

Taktik ini muncul dari ide bahwa kita dapat menjaga agar orang-orang tetap berada di luar kantor polisi—dan dengan demikian di luar ancaman penyiksaan—dengan cara memediasi konflik-konflik di luar sistem pengadilan.

Sebagai sebuah alternatif bagi sistem keadilan pidana, *Centre for Victims of Torture*—CVICT (Pusat untuk Korban Penyiksaan di Nepal) telah menciptakan sebuah proses mediasi komunitas. Proses ini membuat orang tidak perlu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, di mana 60% tahanan disiksa agar mau memberikan pengakuan.

CVICT melakukan kajian mengenai tipe-tipe pertikaian apa yang ada, kemudian mengembangkan sesi pelatihan untuk memandu komunitas, termasuk perempuan dan kaum *Dalits* (dari kasta yang tidak tersentuh), mengenai penyelesaian pertikaian dengan metode mediasi komunitas berdasarkan hak. Mediasi komunitas tersedia untuk pertikaian di luar kejahatan dengan menggunakan kekerasan dan ini berlaku untuk setiap orang, terlepas dari umur, jenis kelamin, kelas atau kasta sosialnya. Untuk merekrut pelatih, CVICT menyelenggarakan pertemuan massal di tiap komunitas dan memintakan kesediaan beberapa relawan. Relawan ini kemudian menjalani pelatihan HAM, hukum setempat, serta metode penanganan pertikaian. Banyak relawan yang telah terlibat dalam mediasi pertikaian dapat membangun ketrampilan mereka. Para pelatih ini pada gilirannya melatih relawan-relawan baru di level lokal lainnya.

Relawan-relawan ini membentuk komite untuk menjadi mediator pertikaian

di level lokal. Setiap komite terdiri dari setidaknya 30% perempuan dan memiliki setidaknya seorang wakil dari minoritas etnis dalam komunitas. Langkah-langkah dan peraturan dalam proses mediasi adalah sangat jelas, dimulai dengan permintaan untuk mediasi dan melibatkan perwakilan dari kedua belah pihak.

Selama sesi mediasi, lima hingga sembilan mediator terlatih ditempatkan di antara pihak-pihak bertikai, yang juga dapat membawa beberapa lainnya untuk mendukung mereka. Komite mediasi menjelaskan struktur proses mediasi dan pihak-pihak yang ada, kemudian pendukung kedua belah pihak juga menyampaikan kasus mereka masing-masing. Mediator kemudian melibatkan pihak-pihak yang ada dalam diskusi mengenai pilihan-pilihan yang mungkin diambil dalam kesepakatan bersama. Umumnya solusi bagi pihak-pihak yang berkonflik muncul dengan cara ini. Akan tetapi, mediator juga memiliki kapasitas untuk menilai bahwa investigasi lebih jauh atau tindakan hukum dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu. Mediator dapat memutuskan untuk mengarsip kasus atas nama salah satu pihak, yang mengakibatkan orang-orang kaya juga bersedia terlibat dalam proses ini.

Di tiga distrik yang telah mengimplimentasikannya, sistem mediasi ini memperbaiki akses untuk keadilan (*access to justice*) dan mempengaruhi dinamika kekuasaan. Hal ini juga sangat mengurangi jumlah orang yang ditangkap; pada tahun pertama $\frac{2}{3}$ kasus diselesaikan melalui mediasi sementara sisanya dibawa ke polisi dan pengadilan. *Project* mediasi komunitas dari CVICT telah dapat menyelesaikan sejumlah besar pertikaian lokal, menciptakan kesadaran akan HAM dan mengurangi konflik di dalam keluarga dan di antara para tetangga. CVICT memperluas *project* ke dua-belas distrik, di mana $\frac{1}{3}$ dari penduduk negara itu akan memiliki akses atasnya.

Karena di Nepal penyiksaan kerap digunakan di kantor polisi sebagai alat interogasi, mediasi adalah sebuah cara efektif untuk mencegah penyiksaan dengan cara menjauhkan orang dari kantor polisi. Taktik ini memiliki keuntungan signifikan lainnya juga: ia memperluas akses kepada keadilan bagi orang-orang yang mungkin tidak memiliki cara lain untuk menyelesaikan pertikaian mereka atau membawa keluhan terhadap pihak yang kaya. Taktik ini juga melatih masyarakat lokal untuk melaksanakan atau memperluas peran kepemimpinan mereka di dalam komunitas.

*Saya berasal dari desa.
Banyak teman-teman saya juga bekerja di desa.
Orang kerap mengeluhkan waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan pertikaian berlarut-larut ini.
Ketika orang dapat menyelesaikan pertikaian dengan cara seperti ini,
hal ini akan mencegah dilangsungkannya praktik penyiksaan
dan juga memberikan lebih banyak waktu
untuk aktivitas-aktivitas membangun*

*Bhogendra Sharma
Centre for Victims of Torture, Nepal*

Penghancuran Catatan: Melindungi kebebasan berpikir dan hak atas rahasia pribadi dengan cara menghancurkan catatan yang dapat diminta oleh pemerintah

Di Amerika Serikat, organisasi profesional nasional meningkatkan berbagai upaya untuk mencegah potensi pelanggaran hak atas rahasia pribadi dan kebebasan intelektual, dengan cara memastikan sesedikit mungkin catatan yang tersimpan.

Secara tradisional, pustakawan di seluruh penjuru Amerika Serikat telah mencegah pembatasan atas kebebasan intelektual dengan cara menghancurkan catatan perpustakaan yang tidak perlu sesegera mungkin. *American Library Association*—ALA (Asosiasi Perpustakaan Amerika) adalah asosiasi perpustakaan terbesar di dunia, dengan lebih dari 64.000 anggota yang telah menggunakan pengaruhnya untuk melawan perubahan pada Undang-Undang Federal yang mengurangi perlindungan terhadap catatan perpustakaan.

48 negara bagian memiliki Undang-Undang mengenai buku yang membuat catatan pendukung perpustakaan bersifat rahasia. Kode etik ALA dan kebijakan kerahasiaannya juga melindungi rahasia pelanggan. Akan tetapi Undang-Undang Patriot tahun 2001, secara khusus memberikan kewenangan baru bagi agen penegakan hukum federal untuk menggeledah catatan perpustakaan dan terminal komputer publik untuk melihat buku pendukung apa yang dibaca maupun *website* apa yang mereka akses dengan alasan untuk mencegah terorisme.

Sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Patriot, para pustakawan mengkaji kebijakan retensi catatan mereka untuk memastikan agar catatan yang tidak diperlukan dilenyapkan sesegera mungkin. ALA telah mengembangkan

pedoman yang mencakup rekomendasi untuk mengurangi catatan pendukung kepustakaan yang tidak perlu dan melenyapkan semua catatan segera setelah tidak lagi diperlukan. Pustakawan di seluruh penjuru negeri mendapatkan dukungan dari organisasi nasional yang berpengaruh di belakang mereka, ketika memilih untuk melenyapkan catatan pendukung, yang merupakan reaksi atas ketentuan hukum tersebut.

ALA, sebuah organisasi nasional yang berpengaruh, menggunakan Undang-Undang perlawanan yang sungguh-sungguh sederhana dan ketika dilakukan serempak di seluruh penjuru negeri, ini menjadi tindakan yang relatif aman bagi pustakawan individual. Dalam konteks yang lebih represif, perlawanan semacam itu—meskipun sepenuhnya legal—mungkin dapat pula memancing reaksi-reaksi pembalasan.

Menerbitkan Pengetahuan Tradisional Secara Online: Melindungi hak kultural dan ekonomi komunitas suku-suku asli dengan cara mencatat pengetahuan ekologis tradisional

Begitu banyak komunitas adat (suku asli) telah menemukan bahwa cara hidup mereka sangat menurun ketika korporasi swasta mematenkan pengetahuan tradisional mereka. Sebuah organisasi ilmu pengetahuan nasional tengah bekerja untuk menghentikan terjadinya hal ini.

Program Ilmu Pengetahuan dan HAM dari *American Association for the Advancement of Science*—AAAS (Asosiasi Amerika untuk Pemajuan Ilmu Pengetahuan) telah menciptakan sebuah *database* yang dapat ditelusuri secara *online* mengenai pengetahuan ekologis tradisional untuk mencegah perusahaan swasta mengklaim hak paten atas pengetahuan itu. *Traditional Ecological Knowledge Prior Art Database* (T.E.K.P.A.D.) berlokasi di situs web <<http://ip.aaas.org/tekindex.nsf>>.

Komunitas suku-suku asli di seluruh pelosok dunia selama ratusan tahun telah memelihara tanaman dan mengembangkan berbagai metode secara sistematis memanfaatkannya untuk kepentingan komunitas mereka. Namun perusahaan-perusahaan dari negara maju kerap kali mematenkan pengetahuan ini tanpa seijin dari komunitas-komunitas itu sendiri. Hak paten itu memungkinkan pemegangnya mengontrol penggunaan dan penjualan dari subyek paten itu selama periode waktu tertentu, tanpa kewajiban apa pun untuk membagi keuntungan dengan

komunitas-komunitas itu. Dalam beberapa kasus, pemegang hak paten bahkan dapat mencegah komunitas-komunitas asli itu untuk menggunakan dan mengambil kemanfaatan dari kearifan tradisional mereka sendiri!

Database membantu mengakhiri hal ini dengan cara membuat pengetahuan tradisional tersedia di ranah publik, yang didefinisikan sebagai “seni yang telah ada sejak dahulu” (“*prior art*”). Sebuah penemuan baru dapat dipatenkan hanya jika ia sepenuhnya baru, bermanfaat dan tidak jelas dengan sendirinya. Jika penemuan baru atau pengetahuan itu telah dipublikasikan di suatu tempat—suatu bentuk dari apa yang disebut “seni terdahulu”—tentu ia tidak dapat diklaim sebagai hal baru. Pengetahuan tradisional telah menjadi rentan terhadap pematenan oleh perusahaan-perusahaan asing karena ia jarang dipublikasikan di manapun atau, jika ia telah dipublikasikan, acap kali luput dari perhatian.

Sekali informasi ini telah ditambahkan pada *database* ia akan lebih mudah untuk ditemukan oleh *U.S. Patent and Trademark Office*—USPTO (Kantor Pematenan dan Merek Dagang Amerika Serikat) maupun oleh otoritas pematenan lainnya dalam penelusuran “seni terdahulu”. AAAS juga secara aktif mengkaji pengetahuan-pengetahuan tradisional yang tidak terlindungi dan berada di ranah publik, kemudian menambahkan informasi itu pada *database* untuk melindunginya lebih jauh.

T.E.K.P.A.D. juga memungkinkan publik untuk mengajukan entry. Individu yang mengajukan *entry* harus membuktikan bahwa mereka memiliki ijin terlebih dulu dari komunitas mereka. AAAS mendorong berbagai komunitas asli untuk mengeksplorasi isu yang berkaitan dengan berbagai pilihan, termasuk mengajukan aplikasi untuk hak paten itu sendiri, sebelum menambahkan pengetahuan mereka pada *database*. Sebuah Buku Acuan Kerja yang dikembangkan untuk membantu komunitas mengevaluasi pilihan mereka tersedia di situs web <<http://ip.aaas.org/tekindex.nsf>>.

Database T.E.K.P.A.D. saat ini melindungi 30.000 tanaman yang dipelihara dan dikelola oleh komunitas asli dari eksploitasi hak paten.

Ketika perusahaan swasta diijinkan untuk memegang hak paten atas pengetahuan tradisional yang dapat menjadi basis dari mata pencaharian komunitas tertentu, komunitas tersebut mungkin kehilangan hak kultural dan ekonomi mereka. Ketika mereka tidak lagi diijinkan untuk menggunakan pengetahuan itu, atau dipaksa untuk membayar royalti, maka mata pencaharian dan tradisi mereka mungkin akan terancam punah. Kegunaan dari taktik pencatatan dan penerbitan ini membantu mencegah terjadinya hal tersebut.

Adalah menarik bahwa teknologi digunakan untuk melindungi hak komunitas suku-suku asli untuk mengambil keuntungan dari pengetahuan yang—dalam beberapa kasus—berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun. *Database online* juga telah digunakan untuk membangun kesadaran akan pelanggaran HAM, seperti dalam rangka menyorot polusi tingkat tinggi di area-area yang dimiskinkan, atau mengenai praktik-praktik korupsi merajalela yang begitu akut, atau dalam rangka memberikan tekanan demi perubahan kebijakan.